

## PERANAN PEMERINTAH DALAM STABILISASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Yuli Awalunnisa<sup>1)</sup> Rayhan Aditiya<sup>2)</sup> Aida Nur Ainun<sup>3)</sup> Diva Deda Sepkamala<sup>4)</sup> Mawar<sup>5)</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Correspondence		
Email: <a href="mailto:yuli080703@gmail.com">yuli080703@gmail.com</a>	No. Telp: 085810037869	
Submitted: 20 December 2023	Accepted: 29 December 2023	Published: 30 December 2023

### ABSTRACT

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peranan pemerintah dalam stabilisasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. masalah berfokus pada perekonomian yang dapat dikatakan belum stabil hal ini disebabkan oleh inflasi yang tinggi, pengangguran, dan kemiskinan. Pemerintah memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga stabilitas untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang - barang kebutuhan yang matang dan tingkat pertumbuhan yang memadai, mencakup pengendalian inflasi, mengurangi tingkat pengangguran, dan memonitoring pertumbuhan ekonomi yang sehat. pendekatan masalah ini dipergunakan 3 acuan kebijakan stabilitas perekonomian yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan strukturisasi perekonomian. Metode yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil dari pembahasan ini adalah Pemerintah Indonesia berperan signifikan dalam stabilisasi pertumbuhan ekonomi, peran Pemerintah mencakup partisipasi internasional seperti aktif dalam forum G20, pengelolaan pasokan pangan, dan stabilisasi makroekonomi, dengan fokus pada kesejahteraan pelaku UMKM serta keterjangkauan pangan pokok bagi konsumen. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. namun demikian, perlunya penanganan tantangan ketergantungan indonesia pada hibah pinjaman luar negeri untuk menutup defisit gandanya, akibatnya rawan perekonomian indonesia mengalami perkembangan dan keuangan internasional.

**Kata kunci:** Peran Pemerintah, Stabilisasi, Pertumbuhan Ekonomi

### Pendahuluan

Di Indonesia, peraturan mengenai upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional yang jelas sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah, dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam kebijakan tersebut UU No 11 Tahun 2020, menimbulkan perselisihan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat terhadap hukum perekonomian, dunia usaha, dan investasi. sehingga seluruh proses ketenagakerjaan dengan prinsip check and balances antara presiden dan DPR RI, khususnya dalam hal adanya situasi-situasi ancaman yang sebagaimana diuraikan oleh Bapak Presiden hingga akhirnya DPR RI memiliki dua mekanisme dan prosedur berhak untuk menyetujui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen yang menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami deflasi, karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan covid 19, namun kebijakan tersebut, malah menyebabkan berkurangnya jumlah konsumsi Rumah tangga dan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga padahal kedua konsumsi ini sangat berpengaruh terhadap kontraksi pada produk domestik bruto. Pemerintah Mengurangi alokasi di bidang infrastruktur pada tahun 2020 dan peningkatan anggaran untuk kesehatan guna penanggulangan pandemi di Indonesia selain itu penurunan terjadi pada investasi, penurunan perdagangan ekspor dan impor dengan pihak luar negeri, penurunan ini sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia.

Melihat penurunan dalam perekonomian tersebut, pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian

Indonesia. kebijakan tersebut dilakukan dengan konsisten dan bekerja sama dengan komponen lain. Kontribusi yang dilakukan baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ikut serta dalam pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini. Pemda berperan strategis untuk mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi dalam APBD. selain itu masyarakat dan pelaku usaha juga berperan strategis dalam pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia. pemerintah memberikan kebijakan fiskal maupun moneter untuk dapat bersama-sama bergerak maju untuk memulihkan perekonomian di Indonesia.

Selain itu, pemerintah memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga stabilitas untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan yang matang dan tingkat pertumbuhan yang memadai, mencakup pengendalian inflasi, mengurangi tingkat pengangguran, dan memonitoring pertumbuhan ekonomi yang sehat. Peranan yang diambil pemerintah dalam stabilisasi untuk meningkatkan kesempatan kerja adalah menyiapkan kebijakan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja. Serta peningkatan investasi. penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja, serta peningkatan investasi.

Dalam menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pemerintah memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan strategis terus ditingkatkan, dengan memasifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau operasi pasar kebutuhan bahan pokok di sejumlah daerah, program ini dilakukan untuk fasilitasi dan persiapan untuk dapat dilaksanakan setiap tahun, mengingat pentingnya peranan dalam pengendalian harga dan inflasi pangan. kegiatan pasar murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mengendalikan inflasi di daerah, untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah melakukan pelaksanaan operasi pasar serentak dan berkelanjutan, optimalisasi belanja tidak terduga (BTT), peningkatan kerjasama antar daerah (KAD), publikasi harga dan stok kepada masyarakat serta subsidi ongkos angkut.

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi penelitian terdahulu yang telah dilakukan, mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian, mengevaluasi bukti-bukti yang ada, serta mengidentifikasi celah pengetahuan atau pertanyaan penelitian yang masih belum terjawab. Menurut Danial dan Warsiah Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian Menurut Burhan Bungin, studi literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa studi literatur adalah mencari referensi teori yang sesuai dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat ditemukan di buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan berbagai situs di internet. Output dari studi literatur ini adalah terkumpulnya referensi yang relevan dengan rumusan masalah.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Definisi Stabilisasi Ekonomi

Merupakan suatu upaya untuk menjaga ekonomi suatu negara agar beroperasi dengan baik, mengalami pertumbuhan yang sehat, serta tetap stabil dalam menghadapi perubahan secara eksternal. Pemerintah Dalam mengambil langkah kebijakan yang harus secara tepat karena

peranan pemerintah sangatlah penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Negara. Stabilisasi merupakan fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan dalam ekonomi, politik, hukum, dan keamanan.

Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga salah satu adalah pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. UU Pangan Menyatakan bahwa sumber utama penyediaan pangan Nasional berasal dari produksi dalam Negeri dan cadangan pangan Nasional. Jika kedua sumber tersebut tidak mencukupi, maka dapat dipenuhi dari impor.

Stabilisasi sebagai tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan pemerintah pada saat inflasi yang tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. UU Pangan bertujuan untuk melindungi produsen maupun para petani dan konsumen agar terciptanya kesejahteraan. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam melakukan kebijakan. Didalam poin inti dari UU Pangan adalah pemberian akses dan kontrol besar terhadap lahan pertanian melalui hak penguasaan lahan melalui reformasi dan peningkatan akses. Selain itu, juga dibutuhkan kedaulatan pangan yang harus dicapai melalui lima usaha yaitu produksi pokok, stabilisasi harga pangan, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan. Di bidang sembako, pemerintah menerapkan kebijakan dalam meringankan beban masyarakat dengan cara langkah yang komprehensif dan holistik guna mengurangi dan menyelesaikan berbagai persoalan kenaikan harga, baik melalui kebijakan atau langkah taktis di lapangan dalam bentuk operasi pasar. Kami Akan Membahas Beberapa Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Negara:

- Partisipasi Indonesia dalam G20

G20 merupakan forum internasional yang membahas isu ekonomi dan moneter global dengan dampak signifikan. Namun, melampaui ekspektasi, berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia terpilih sebagai salah satu dari lima besar anggota G20 yang mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan capaian sebesar 5,2% pada tahun 2018. G20 sebagai wadah diskusi yang cukup besar terus aktif berperan dalam memecahkan isu-isu ekonomi global yang muncul. Bagi Indonesia, keanggotaan dalam G20 membuka peluang besar dalam hal investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan ide-ide untuk mendukung perkembangan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Pada KTT di Osaka tahun 2020, Indonesia turut berpartisipasi aktif dengan menyumbangkan sebuah ide ekonomi digital yaitu IDEA Hub. IDEA Hub menurut Presiden Jokowi memiliki tiga sektor yaitu Sharing economies, Workforce Digitalization dan Financial Inclusion. Hal-hal semacam ini mendukung anggota G20 dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi negara mereka, ini juga berlaku untuk Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi masih mengalami keterlambatan dengan tingkat sekitar 5,17%. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat peningkatan sebesar 0,01%. Pada pertemuan KTT terakhir, Indonesia juga berencana untuk memperluas kerjasama bisnis dengan India melalui bidang ekonomi dan maritim serta menjajaki peluang ekspor-impor kelapa sawit dengan Perdana Menteri India. Peran pemerintah dalam mengikuti forum ini sudah sangat tepat karena dengan adanya G20 ini sangat membantu perekonomian Indonesia.

- Pengelolaan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Di Indonesia

Badan Pangan Nasional memiliki beberapa program yang didasari dari sasaran strategis yang telah ditentukan. Sasaran strategis kedua adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sasaran strategis ini diturunkan menjadi salah satu program yaitu stabilisasi pasokan dan harga pangan. Stabilisasi Pasokan dan harga pangan dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok. Adapun Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis kedua adalah:

1. Penguatan sistem logistik Nasional
2. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen
3. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan
4. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan). Merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai berikut:
  1. Kestabilan harga barang, terutama stabilisasi harga barang pokok terbukti mampu menjaga kondisi politik, masyarakat cenderung lebih tenang karena kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik sehingga stabilitas negara terjaga.
  2. Kestabilan harga turut mencerminkan kondisi psikologi masyarakat karena panic buying yang mungkin terjadi. Stabilitas harga penting dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.
  3. Inflasi menjadi salah satu objek penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui otoritas moneter atau bank sentral, negara berusaha mengendalikan laju inflasi agar tetap stabil.

Stabilisasi Yang Disampaikan Presiden Tahun 2022 Dengan Mempertahankan Kawasan Ekonomi Lebih Resilien Dan Hijau Di Indonesia Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut. Menurut Presiden Joko Widodo Nomio, untuk mempertahankan kawasan sebagai pusat pertumbuhan (epicentrum of growth) harus diwujudkan dalam dua hal yakni stabilitas kawasan untuk menjaga perdamaian serta fokus kerja sama ekonomi yang diarahkan untuk membangun ekonomi kawasan yang lebih resilien dan hijau. “Perbedaan dan rivalitas harus dikelola dengan baik sehingga konflik tidak terjadi di kawasan Indo-Pasifik. ASEAN dan Korea Selatan harus menjadi mesin utama perdamaian di kawasan,” ungkap Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, untuk penguatan kerjasama ekonomi kawasan yang lebih resilien dan hijau, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Korea Selatan mempunyai pengalaman dalam pengembangan teknologi hijau dan energi bersih.

Pembangunan hijau dan berkelanjutan menjadi kunci masa depan ASEAN yang pada tahun 2025 ditargetkan akan menggunakan 23% energi terbarukan dan 20% kendaraan berbahan bakar listrik. “Ini adalah peluang bagi kita untuk menjalin kemitraan yang konkret terutama dalam energi terbarukan, pembangunan smart city, ekosistem mobil listrik, serta sistem penyediaan air bersih,” pungkas Presiden Joko Widodo. Sebagai penutup, Presiden Joko Widodo turut mengundang Korea Selatan untuk menjadi mitra dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui investasi maupun alih teknologi untuk menjadikan IKN sebagai kota yang hijau dan berkarbon negatif. Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN-Indonesia turut menyampaikan bahwa ASEAN memiliki potensi ekonomi hijau sebesar USD 1 triliun dan menciptakan 30 juta pekerjaan pada 2030. Saat ini paling tidak terdapat dua inisiatif penting yang dibahas yakni ekonomi sirkular

yang bertujuan menjadi panduan transisi ASEAN pada ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya memperhatikan tentang perubahan iklim yang berlaku secara global dan meningkatnya produksi berbasis green dan sirkuler, maka disusun pula strategi ASEAN terkait netralitas karbon yang diharapkan akan dapat diselesaikan pada tahun depan.

Tujuan Stabilitas Harga Menurut Bank Indonesia Yaitu:

1. Inflasi yang tinggi membuat pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup masyarakat turun.
2. Inflasi yang tidak stabil akan menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sehingga masyarakat akan merasa sulit dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
3. Inflasi domestik yang lebih tinggi daripada inflasi di negara tetangga bisa menyebabkan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif, sehingga nilai rupiah akan tertekan sehingga nilainya tetap rendah.

- **Stabilisasi Makroekonomi Di Indonesia**

Stabilisasi Makroekonomi Adalah suatu kondisi dimana kerangka kompleks lembaga dan kebijakan moneter dan fiskal ditetapkan untuk mengurangi volatilitas dan mendorong pertumbuhan yang meningkat kesejahteraan. Untuk mencapai kondisi ini diperlukan penyalarsan mata uang dengan tingkat pasar, pengelolaan inflasi, penetapan fasilitas devisa, pengembangan anggaran nasional, perolehan pendapatan, penciptaan sistem pengeluaran publik yang transparan, dan pencegahan pelaku predator yang menguasai sumber daya negara. 499 Hal ini juga memerlukan kerangka undang-undang dan peraturan ekonomi yang mengatur proses anggaran, operasional bank sentral, perdagangan internasional, perdagangan dalam negeri, dan lembaga tata kelola ekonomi. Stabilisasi perekonomian merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Bukti Empiris menunjukkan bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung tingkat investasi yang lebih tinggi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan, sementara pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi positif dengan penciptaan lapangan kerja dan standar hidup yang lebih tinggi.

Stabilitas moneter merupakan pendekatan subjektif karena terdapat berbagai tingkat upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapainya. Pada fase awal pemulihan, pendekatan ini mungkin melibatkan stabilisasi mata uang, membawa inflasi dan nilai tukar mata uang asing ke tingkat yang konsisten dengan pertumbuhan berkelanjutan, mendorong prediktabilitas dan manajemen yang baik dalam sistem perbankan, dan mengelola utang luar negeri. Otoritas utama biasanya merupakan bank sentral independen yang mengendalikan atau menstimulasi perekonomian secara keseluruhan dengan memanipulasi jumlah uang beredar dan suku bunga, dalam parameter kebijakan moneter.

Menginformasikan keputusan moneter dengan menyiapkan sistem pengumpulan data ekonomi. Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi merupakan kunci dalam proses pengambilan kebijakan moneter yang baik. Meskipun kantor statistik sering diabaikan di negara-negara yang dilanda perang, pemerintah negara tuan rumah dan aktor internasional perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Pada fase darurat, membantu pemerintah negara tuan rumah dalam membentuk mekanisme sementara untuk mengumpulkan informasi tepat waktu mengenai harga konsumen, neraca pembayaran, dan statistik moneter lainnya. 503 Perhatian yang terlambat terhadap badan statistik dapat memaksa kementerian keuangan untuk melakukan analisis statistik ad hoc untuk menyusun indeks harga konsumen, estimasi PDB, dan neraca Nasional.

### Kesimpulan

Secara keseluruhan, peran pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian negara mencakup partisipasi aktif dalam forum internasional seperti G20, yang memberikan peluang besar bagi negara ini dalam hal investasi dan pengembangan ekonomi. Keanggotaan dalam G20 juga menjadi platform untuk menyumbangkan ide-ide inovatif, seperti yang terjadi pada KTT di Osaka tahun 2020 dengan kontribusi proyek ekonomi digital IDEA Hub. Selain itu, upaya pemerintah dalam mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Badan Pangan Nasional mencerminkan tanggung jawab untuk melindungi pendapatan para pelaku usaha pangan mikro dan kecil serta menjaga keterjangkauan pangan pokok bagi konsumen.

Pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang ekonomi dan lingkungan di tahun 2022 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kawasan ekonomi yang lebih resilien dan hijau. Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat penting dalam memitigasi perbedaan dan rivalitas di kawasan Indo-Pasifik serta membangun kerja sama ekonomi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, upaya untuk menjalin kemitraan dengan Korea Selatan dalam pengembangan teknologi hijau, energi bersih, dan proyek-proyek berkelanjutan seperti Ibu Kota Nusantara menunjukkan langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### Referensi

#### Jurnal Ilmiah

- a. Alvela,P. 2020. G20 Sebagai Kemajuan Ekonomi Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, Vol 13, DOI 10.20473
- b. Bagus, dkk. 2023. Peranan Pemerintah Dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Pasca Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi Islam, Vol.4, No.1
- c. Susi,L. 2022. Analisis Peran Dinas Koperasi dan Perdagangan Dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok. Jurnal Ilmu Komputer,Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol.1, No.2

#### Artikel Online

- a. Kemenko Perekonomian. 2022. Pertahankan Kawasan Sebagai Epicentrum Of Growth Stabilisasi Kawasan Dan Ekonomi Yang Lebih Dan Hijau Harus Diwujudkan ASEAN.
- b. Badan Pangan Nasional. 2023. Pasokandan Harga Pangan.
- c. Departemen Komunikasi. 2023. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat. .
- d. Kemenkeu.go.id.2022. Stabilisasi Alokasi Distribusi Tiga Fungsi APBN.
- e. Kominfo. 2020. Perluas Lapangan Kerja, Pemerintah Tingkatkan Iklim Investasi dan Daya Saing Nasional.
- f. Stieykpn. 2023. Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.
- g. United States Institute Of Peace. Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction:Sustainable Economy.
- Yenni,P. 2020. Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19.